

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tokoh politik nasional dan negarawan terkemuka yang mungkin hingga hari ini juga masih dikenang bangsa Indonesia adalah Muhammad Natsir. Sosok yang juga dikenal dalam dunia Islam sebagai tokoh pergerakan Islam, tokoh pendidikan Islam, tokoh politik, negarawan terkemuka, dan pemimpin umat yang berpengaruh di negeri ini. Salah satu jasa besar Natsir bagi Republik ini yang hingga hari ini masih dikenang salah satunya adalah jasanya dalam terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 3 April 1950, dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen, Natsir mengajukan mosi di Sidang Parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat). Gerakan itu dikenal sebagai "Mosi Integral Natsir" yang memungkinkan penyatuan kembali 17 Negara ke dalam Republik Indonesia.<sup>1</sup> Sejak saat itu, gugurlah negara-negara boneka buatan Belanda.

Mohammad Natsir yang telah memicu mosi, oleh Presiden Soekarno, diberi kepercayaan untuk menyusun dan memimpin pemerintahan Republik Indonesia pertama setelah Indonesia kembali ke Negara Kesatuan. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Partai Masyumi ketika itu, Natsir adalah yang pertama menolak gagasan

---

<sup>1</sup> Murjoko, 2004, "*Mosi Integral Natsir 1950*", Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 26.

politik Presiden Soekarno untuk mengubur partai dan menerapkan konsepsi Demokrasi Terpimpin (1956). Natsir berkeyakinan, selama ada demokrasi, selama itu pulalah partai politik tetap akan ada. Karena tanpa partai politik, itu sama saja dengan kematian dari sistem demokrasi itu sendiri. Dan baginya, yang tersisa dari diruntuhkannya semua partai politik hanyalah seorang diktator.<sup>2</sup>

Hal yang menarik lainnya dari pemikiran seorang Muhammad Natsir salah satunya adalah pandangannya mengenai Pancasila dan Islam. Bagi Natsir, tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam, kecuali jika Pancasila memang sengaja diisi oleh paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Baginya, Pancasila dan Islam adalah hubungan yang sinergi dan harmonis. Pancasila akan hidup subur dalam pangkuan ajaran Islam. Dan Islam, akan tenteram bersama dengan Pancasila.<sup>3</sup>

Pandangan Natsir tentang Agama, Politik dan Negara adalah bahwa agama tidak boleh hanya semata-mata sebagai ritual peribadatan sehari-hari. Tetapi lebih dari itu. Dari pernyataan tersebut, Natsir menegaskan bahwa agama dan negara itu berhubungan secara integral, bahkan simbiosis, yaitu hubungan yang saling memerlukan. Dalam hal ini, agama membutuhkan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena dengan negara agama dapat berkembang di bidang etika dan moral.<sup>4</sup> Pemikiran politik Muhammad

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, 1996, *Islam dan Masalah kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES), hlm 155.

<sup>4</sup> Mohammad Natsir, 2000, *Fiqhud Dakwah*, (Jakarta: Yayasan Capita Selecta), hlm 25.

Natsir yang berciri khas religius-demokratis tentu sangat menarik untuk dikaji, terlebih jika dianalisis dalam perspektif sosiologi.

Ketika Orde Baru didirikan, M. Natsir dengan tabah menerima kenyataan bahwa ia dan partainya, Masyumi, tidak mungkin tampil lagi dalam politik. M. Natsir mulai menentang pemerintah Orde Baru dengan bergabung untuk menandatangani Petisi Lima Puluh (Petisi 50) yang kemudian menjadikannya musuh pemerintah Suharto. Setelah menjadi musuh Orde Baru, M. Natsir tidak ditahan, tetapi menjadikan haknya sebagai manusia dan warga negara yang direbut oleh pemerintah. Dua kali M. Natsir mengalami kenyataan pahit, ketika harapan baru untuk masa depan dibagi dalam pikiran dan pola tingkah lakunya, tetapi dua kali ia mengalami pengasingan karena alasan yang sama. M. Natsir meninggal pada tahun 1993. M. Natsir adalah sosok yang bisa dikatakan langka karena bakatnya. Dia adalah seorang pengkhotbah, negarawan, pendidik, dan politisi hebat yang pernah dimiliki oleh orang Indonesia.

Berakhirnya sejarah Masyumi di panggung politik di Indonesia sebenarnya mengakibatkan habisnya kekuatan dakwah Islam secara politis. Akibatnya, tokoh-tokoh itu bertebaran untuk mencari posisi di organisasi massa Islam lainnya. Beberapa bergabung dengan Nahdlatul Ulama, seperti KH. Idham Khalid, dan KH. Maskur, dan beberapa bergabung dengan Muhammadiyah seperti Mr. Moh Kasman Singodimejo. Namun, Mohammad Natsir memilih jalan yang berbeda dari orang-orang yang

disebutkan di atas. Mohammad Natsir memilih untuk mendirikan organisasi Dakwah, yang kemudian dikenal sebagai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).<sup>5</sup>

Kepemimpinan Natsir di DDII membawa angin segar ke dakwah Islam di Indonesia. Konsep amar ma'rūf nahī munkar agaknya lebih diterima di mata masyarakat. Panggilan untuk berkhotbah juga tampaknya didistribusikan secara merata di semua lapisan. Mulai dari birokrasi, hingga tokoh agama atau tokoh agama dan non-Muslim. Terhadap pemerintah dalam rezim Sukarno dan Suharto, Mohammad Natsir tampak sangat konsisten dalam melaksanakan upaya dakwah Islam. Demikian juga, tokoh-tokoh non-Islam tidak luput dari target dakwah Islam ala Natsir.<sup>6</sup> Sangat disayangkan bahwa pendekatan dakwah Islam yang diambilnya terlihat sangat formal, yaitu, menggunakan opini terbuka melalui media cetak, dalam bentuk majalah surat kabar yang dijalankan oleh media dakwah. Sementara media dari hati ke hati sebagai ayah kepada anak-anak tidak dilakukan. Ini kemudian memberi kesan bahwa Natsir tampaknya berusaha menjauhkan diri dari perannya sebagai seorang ayah dan pada saat yang sama sebagai seorang pengkhotbah terkenal dalam dakwah Islam sebagai konsekuensi dari tindakan-tindakan ini. Bahwa pemerintah di tingkat birokrasi mulai mencurigai pergerakan propaganda Islam melalui DDII, terutama oleh birokrasi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>6</sup> M. Khoirul Hadi, 2014, "Dakwah Transformatif Mohammad Natsir.", *WALISONGO*, II(22), hlm. 458.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 459.

Khusus di bidang dakwah, M. Natsir adalah orang yang tangguh dalam upaya menerobos birokrasi dan melalui daerah-daerah terpencil dengan mengirimkan kekuatan dakwah ke tempat-tempat ini, proses re-Islamisasi dan Islamisasi di daerah sulit dibantah. Bahkan, daerah-daerah terpencil dikunjungi oleh para dai dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Terlepas dari kekuatan dan kelemahan Natsir, semua kelompok, baik di tingkat nasional maupun negara dan agama, mengakui dedikasinya dalam berdakwah. Pengakuan bangsa tidak mengada-ada, tapi itu adalah *de facto*. Faktanya adalah banyak institusi pendidikan Dewan Dakwah Indonesia di berbagai daerah di Indonesia.<sup>8</sup>

Penelitian mengenai Mohammad Natsir sebelumnya pernah dilakukan oleh Murjoko (2004) dengan tesisnya yang berjudul *Mosi Integral Natsir 1950*. Penelitian lain yang juga mengambil kajiannya pada pemikiran Mohammad Natsir adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (1995) dengan tesisnya yang berjudul *Islam dan Negara*. Ada juga tesis dari Mahmud Saleh (1995) yang mencoba membandingkan *Pemikiran Muhammad Natsir dan Hasan Al-Banna tentang Negara*. Sementara dalam tulisan skripsi, penelitian tentang Mohammad Natsir juga telah dilakukan oleh Herguita Immas Raspati (2012) dengan judul skripsi *Pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan Dasar Negara*.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 460.

Dari serangkaian penelitian mengenai Mohammad Natsir di atas sebagian besar banyak mengangkat topik seputar pandangan Mohammad Natsir mengenai hubungan antara Islam, negara dan pemerintahan baik yang melihatnya dari sudut hasil pemikiran, membandingkannya dengan pemikiran tokoh Islam lain, maupun seputar konflik panjang antara Natsir dan Soekarno yang terjadi dalam sidang-sidang Majelis Konstituante. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk mengambil fokus pada bagaimana proses transformasi gerakan dakwah Mohammad Natsir melalui partai Masyumi dan pengaruh sosialnya pasca dibubarkannya partai Masyumi melalui lembaga sosial dan dakwah bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Penulis tertarik mengkaji bagaimana konteks sosiologis muncul pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan politik. Penulis juga akan mencoba melihat implementasi pemikiran Mohammad Natsir melalui perspektif sosiologi pengetahuan dan melihat relevansi pemikirannya terhadap perkembangan sosial dan politik Indonesia saat ini.

## **I.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konteks sosiologis pemikiran Muhammad Natsir?
2. Bagaimana proses transformasi pemikiran Mohammad Natsir dari pemikiran politik ke pemikiran sosial?

3. Apa relevansi pemikiran Muhammad Natsir dalam perkembangan politik dan sosial di Indonesia saat ini?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

1. Menguraikan konteks sosiologis dari proses munculnya sebuah pemikiran sosial politik, dalam hal ini pemikiran Muhammad Natsir.
2. Menelaah proses transformasi Mohammad Natsir dari pemikiran politik ke pemikiran sosial.
3. Menganalisis relevansi pemikiran Muhammad Natsir dalam perkembangan sosial dan politik di Indonesia saat ini.

### **I.4. Penelitian Sejenis**

Penelitian mengenai Mohammad Natsir sebelumnya pernah dilakukan oleh Murjoko (2004) dengan tesisnya yang berjudul Mosi Integral Natsir 1950. Menurut Murjoko, paling tidak ada empat peristiwa, mengapa M. Natsir mengajukan Mosi Integral. *Pertama*, susunan negara Indonesia pertama kali adalah Negara Kesatuan. Susunan Negara Indonesia yang pertama kali diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah merupakan Negara Kesatuan. *Kedua*, strategi menghadapi politik “*divide et impera*” Belanda. Faktor berikutnya yang dapat mendorong M. Natsir mengajukan Mosi Integral di Parlemen RIS adalah untuk menghadapi strategi Belanda yang telah

berhasil mendirikan negara RIS atau federal. *Ketiga*, terjadinya gerakan separatis di berbagai daerah. *Keempat*, stabilitas pemerintahan yang tidak stabil. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 sampai dengan munculnya Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 paling tidak ada 12 kali kabinet yang dibongkar pasang, termasuk di dalamnya kabinet Natsir.<sup>9</sup> Kondisi ini memaksa seorang M. Natsir, dari Fraksi Masyumi harus bekerja keras melobi dan memberikan pencerahan kepada semua fraksi-fraksi yang ada di DPR RIS akan persoalan bangsa yang sangat memprihatinkan ini. Usul M. Natsir mendapatkan persetujuan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RIS. Sebagai bukti persetujuan berbagai fraksi memberikan dukungan tandatangan untuk diajukan dalam sidang Pleno DPR RIS pada 3 April 1950. Berbekal dukungan tersebut, M. Natsir mengajukan “Mosi Integral” tentang penyatuan kembali negara-negara bagian menjadi negara Republik Indonesia di Parlemen RIS.

Penelitian lain yang juga mengambil kajiannya pada pemikiran Mohammad Natsir adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (1995) dengan tesisnya yang berjudul *Islam dan Negara*. Mohammad Natsir memiliki pandangan yang modern dalam melihat hubungan antara agama, dalam hal ini Islam, dan negara. Bagaimana akhirnya dia melihat bahwa Islam dan negara memiliki hubungan simbiotik, yang artinya keduanya saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara sebagai alat dalam pelaksanaan ajarannya, sementara negara membutuhkan agama sebagai

---

<sup>9</sup> Murjoko, *Op. Cit.*, hlm. 74.

penuntun dalam menjalankan fungsinya. Konsep pandangan modern Mohammad Natsir dalam memandang hubungan antara agama dan negara tak terlepas dari pengaruh hubungan sosial yang ia jalin. Berasal dari orang yang tidak berada membuat ia harus ikut belajar dengan anak-anak di sekolah secara sembunyi-sembunyi. Nasib baik mulai mendatangnya ketika ia memiliki kesempatan untuk menimba ilmu secara sah di sekolah yang akhirnya membawanya pada perkenalan dengan A. Hasan. Pun dilanjutkan dengan mengikuti organisasi pemuda yang mengenalkannya pula pada sosok KH. Agus Salim. A. Hasan dan KH. Agus Salim, dua orang yang sosoknya sangat dikagumi oleh Mohammad Natsir dan menjadi sumber pengaruh dari pemikiran yang dihasilkannya. Dari mereka yang bergerak dengan asas agama, Mohammad Natsir lantas mempelajari agama dan semangat bergerak untuk meraih kebebasan.<sup>10</sup> Dua hal itu ia jalani dengan beriringan hingga pada suatu ketika ia merasa ada yang janggal dengan pernyataan dari orang-orang di sekitarnya yang menyatakan bahwa agama hanya akan menjadi penghambat dalam memperoleh kemerdekaan. Mohammad Natsir, yang sedari awal sudah memiliki rasa peduli pada rakyat yang tertindas, menilai bahwa agama bukanlah menjadi suatu penghambat, justru agama bisa menjadi obor semangat dalam memperjuangkan kebebasan. Baik itu kebebasan beragama, kebebasan bernegara, maupun kebebasan sebagai seorang manusia.

---

<sup>10</sup> Abdul Rohman, 1995, "Islam dan Negara", Tesis Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah), hlm. 1-3.

Ada juga tesis dari Mahmud Saleh (1995) yang mencoba membandingkan *Pemikiran Muhammad Natsir dan Hasan Al-Banna tentang Negara*. Secara spesifik, persamaan pemikiran Mohammad Natsir dan Hasan Al-Banna mengenai kepemimpinan, bentuk negara Islam dan tujuannya adalah sebagai berikut: (1) Negara yang dikehendaki oleh Hasan Al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin berbentuk Teokrasi. Konsep ini sama dengan konsep Mohammad Natsir dengan teistik demokrasi. (2) Bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh Hasan Al-Banna adalah demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang bersumber kepada Alquran dan Alhadist. (3) Sistem demokrasi tersebut sama dengan apa yang dianut oleh Mohammad Natsir. Bagi Natsir, demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik, menegur dan membetulkan pemerintahan yang zalim dalam bentuk kesalahan ataupun kekeliruan. (4) Pandangan Hasan Al-Banna mengenai negara adalah sebagai alat (*wasilah*) yang dapat memberlakukan di dalamnya hukum Islam. Hal ini sama dengan pandangan Mohammad Natsir yang mengatakan bahwa negara baginya bukanlah tujuan, tapi merupakan alat yang dapat berlaku di dalamnya undang-undang *Ilahi* untuk keselamatan dan kesentosaan semesta. Selain persamaan, adapula ide perbedaan Mohammad Natsir dan Hasan Al-banna yaitu dari segi gelar yang disandang oleh kepala negara dalam Islam. Berikut penjelasannya: (1) Menurut Natsir, sebutan gelar bagi seorang kepala negara tidaklah menjadi syarat yang terpenting. Khalifah boleh, Presiden boleh, apa saja boleh. (3) Menurut Hasan Al-banna, mengenai titel atau kepala negara, harus diberi gelar khalifah seperti yang pernah ada pada masa

pemerintahan Khulafaur Al-Rasyidin dahulu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemikiran Hasan Al-Banna pada pembentukan pemikiran Mohammad Natsir, terutama yang berkaitan dengan masalah politik karena pemikiran Mohammad Natsir telah dipengaruhi sebelumnya oleh pemikiran politik H. Agus Salim.<sup>11</sup>

Dari serangkaian penelitian mengenai Mohammad Natsir di atas sebagian besar banyak mengangkat topik seputar pandangan Mohammad Natsir mengenai hubungan antara Islam, negara dan pemerintahan baik yang melihatnya dari sudut hasil pemikiran, membandingkannya dengan pemikiran tokoh Islam lain, maupun seputar konflik panjang antara Natsir dan Soekarno yang terjadi dalam sidang-sidang Majelis Konstituante. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk mengambil fokus pada bagaimana proses transformasi gerakan dakwah Mohammad Natsir melalui partai Masyumi dan pengaruh sosialnya pasca dibubarkannya partai Masyumi melalui lembaga sosial dan dakwah bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Penulis tertarik mengkaji bagaimana konteks sosiologis muncul pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan politik. Penulis juga akan mencoba melihat implementasi pemikiran Mohammad Natsir melalui perspektif sosiologi pengetahuan dan melihat relevansi pemikirannya terhadap perkembangan sosial dan politik Indonesia saat ini.

---

<sup>11</sup> Mahmud Saleh, 1995, "Pemikiran Muhammad Natsir dan Hasan Al-Banna tentang Negara", Tesis Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, (Aceh: IAIN Ar-Raniry), hlm. 146-152.

## **I.5. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara akademis

- a. Diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan mengenai Mohammad Natsir dan pemikirannya.
- b. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis.
- c. Tulisan ini memperkaya khazanah literasi mengenai Mohammad Natsir dan kiprah sosial politiknya.

### 2. Secara praktis

- a. Sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial di Universitas Negeri Jakarta.
- b. Memperoleh pengetahuan mendalam mengenai Mohammad Natsir beserta pemikirannya.
- c. Sebagai tolak ukur bagi penulis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam meneliti dan menganalisis suatu gerakan sosial berbasis ketokohan.

## **I.6. Kerangka Konseptual**

### **I.6.1. Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim**

Sosiologi pengetahuan, seperti yang dikemukakan oleh Karl Mannheim adalah sebuah ilmu dalam sosiologi yang mengkaji eksistensi aktor sejarah dalam

memproduksi gagasan tertentu dalam konteks sejarah yang dinamis. Mannheim berpendapat, tidak ada pemikiran manusia yang kebal terhadap pengaruh ideologisasi dan konteks sosialnya. Oleh karena itu, sosiologi pengetahuan menitikberatkan analisisnya kepada eksistensi gagasan dari seorang aktor sejarah, pengaruh pembentukan ideologinya dan konteks sosial dimana sang aktor berada. Hal ini bermaksud untuk memastikan hubungan empiris antara sudut pandang intelektual dan struktural di satu sisi dengan posisi historis di sisi lain. Prinsip dasar yang pertama dari sosiologi pengetahuan Mannheim adalah bahwa tidak ada cara berpikir (*mode of thought*) yang dapat dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi.

Selain itu, sosiologi pengetahuan juga melihat bagaimana suatu gagasan lahir dalam keberadaan subjek (aktor) pada kondisi sosial tertentu. Karena eksistensi sang aktor sangat rentan, maka secara struktural sang aktor terus bergerak dalam dinamika sejarah dan dari bermacam relasi sosial yang ia bangun. Dalam hal ini, sosiologi pengetahuan ingin melihat keterkaitan aktor sejarah dan relasi sosial yang ia miliki ke dalam struktur sosial yang lebih besar. Dalam teori ini, eksistensi aktor dilihat dari bagaimana mobilitas vertikalnya dalam merespon peristiwa sejarah.

Gagasan-gagasan aktor diuji melalui berbagai ide, pemikiran, perdebatan yang pada zamannya sedang menjadi topik utama dalam situasi sosialnya. Dalam hal ini, konteks sejarah hadir sebagai katalisator ide dominan yang terus direspon oleh aktor sehingga melahirkan reproduksi gagasan dan pandangan hidup (*worldview*) sang aktor. Hal inilah yang menjadikan sang aktor eksis di dalam sebuah struktur masyarakat. Di

lain sisi, sejarah memberikan kesempatan kepada sang aktor untuk menempati posisi kelas tertentu di dalam masyarakat. Dalam hal ini, aktor mentransformasikan dirinya ke dalam kelas intelektual di tengah masyarakat.

Secara sosiologis, sosiologi pengetahuan muncul sebagai tanggapan terhadap realitas ilmu-ilmu sosial yang mengadopsi ilmu-ilmu alam baik secara teori, metodologi dan epistemologi.<sup>12</sup> Karl Mannheim, dalam karya-karyanya, melihat masyarakat sebagai subjek yang menentukan bentuk pemikirannya. Sosiologi pengetahuan telah menjadi metode positif bagi manusia di hampir setiap fase pemikiran manusia. Berdasarkan konsep ideologisnya, Mannheim sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemikiran manusia yang kebal terhadap pengaruh ideologisasi dan konteks sosialnya.<sup>13</sup>

Menurut Mannheim, tugas sosiologi pengetahuan adalah untuk memastikan hubungan empiris antara sudut pandang intelektual dan struktural di satu sisi dan posisi historis di sisi lain. Prinsip dasar pertama dari sosiologi pengetahuan Mannheim adalah bahwa tidak ada cara berpikir yang dapat dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi. Gagasan dimunculkan sebagai perjuangan orang-orang dengan masalah-masalah penting dalam masyarakat mereka, dan makna serta sumber dari gagasan-gagasan itu tidak dapat dipahami dengan baik jika seseorang tidak bisa mendapatkan

---

<sup>12</sup> Amin Abdullah, 1999, "*Agama, Kebenaran dan Relativitas*", dalam pengantar Gregory Baum, *Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme*, terj. Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow (Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm. xvi.

<sup>13</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 2012, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES), hlm. 13.

penjelasan tentang basis sosial mereka. Ini tidak berarti, tentu saja, bahwa gagasan dapat diputuskan sebagai salah atau benar hanya dengan memeriksa asal-usul sosialnya, tetapi gagasan itu harus dipahami dalam kaitannya dengan orang-orang yang menghasilkannya dan mengekspresikannya dalam kehidupan yang mereka mainkan.<sup>14</sup>

Mannheim berpikir bahwa sosiologi pengetahuan dan relativitas kebenaran yang mengikutinya hanya mungkin terjadi ketika pergolakan sosial terjadi ketika orang menghadapi banyak pandangan dunia dalam lingkungan mereka sendiri, baik karena mereka telah mengalami perubahan radikal tentang persepsi atau karena mereka diharuskan untuk menggabungkan yang tidak sesuai dengan dirinya, tetapi melalui pergolakan ini mereka tidak bisa melepaskan dirinya. Argumen tentang kebenaran dan kekeliruan ide hanya dapat dipahami jika dua orang bertukar ide tentang pandangan dunia yang sama. Jika dua orang dialog berasal dan datang dari dunia sosial yang berbeda dan terpisah dan beroperasi di luar perspektif sosial yang berbeda, maka argumen seperti itu kemudian menjadi sia-sia dan membuat orang berbicara tentang masa lalu mereka tersendiri.<sup>15</sup>

Menurut Mannheim, pengetahuan secara jelas berasal dari keinginan suatu pihak (biasa dikatakan intelektual) untuk memperoleh kekuasaan dan pengakuan dari kelompok sosial tertentu untuk menerapkan gagasan/interpretasi mereka ke dalam masyarakat yang lebih luas. Intelektual ini yang kemudian bertugas dalam merumuskan

---

<sup>14</sup> Gregory Baum, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>15</sup> *Ibid.*

dan melakukan interpretasi atas sesuatu untuk mereka terapkan pada kelompok asal. Mannheim menyatakan, bahwa pada masa ini, setiap orang/pihak/kelompok seluruhnya berlomba-lomba dalam menciptakan interpretasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, Mannheim juga mengungkapkan bahwa dewasa ini, munculnya konflik perspektif atau ideologis biasanya disebabkan karena adanya konflik antara kekuatan-kekuatan sosial, yang jika diamati, ini berkaitan dengan keberadaan dan pengakuan suatu pihak di masyarakat.<sup>16</sup>

Seperti Foucault, Mannheim meyakini bahwa tidak ada keterpisahan antara kebenaran dan kekuasaan. Foucault, juga sama seperti Mannheim yang percaya dalam mengungkap kebenaran, hambatannya ada di globalisasi, dimana banyak wacana yang akhirnya menyembunyikan perjuangan yang sebenarnya oleh pemerintah-pemerintah yang totaliter. Oleh karena itu, intelektual dituntut untuk mengkritik aparat seperti ini, bukan membutuhkan pengungkapan mereka sebagai produsen ideologi/pemikiran tetapi berdasarkan kemampuan analisis pembangunan dan penyebaran pengetahuan.<sup>17</sup>

Dalam sejarah, Mannheim juga setuju dengan pendapat Troeltsch yang mengatakan bahwa sejarah tetap identik dalam dirinya sendiri, meskipun pada akhirnya diinterpretasikan dalam perbedaan pemahaman intelektual. Jadi setiap orang dari kita mengacu pada data dan esensi yang sama, tetapi pada akhirnya ada sebuah proses

---

<sup>16</sup> Harvey Goldman, 1994, "From Social Theory to Sociology of Knowledge and Back: Karl Mannheim and the Sociology of Intellectual Knowledge Production", *American Sociological Association*, III(12), hlm. 266-278.

<sup>17</sup> Michel Foucault, 1977, *Nietzsche, Genealogy and History, dalam Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interview*, (Ed) D.F.Bouchard, (Ithaca: Cornell University Press), hlm. 164

dialektis. Dalam ideologi dan utopia, Mannheim mengatakan bahwa tampilan struktur menandakan bagaimana seseorang memandang suatu objek dan menangkap apa yang ada di dalamnya serta bagaimana seseorang mengkonstruksi fakta dalam pikirannya sendiri.<sup>18</sup> Oleh karena itu perspektif dari pemikir biasanya terikat berhubungan antara keberadaan dan sudut pandang seseorang. Kebenaran dalam arti perspektif berarti bahwa dalam satu konstelasi sejarah satu kesimpulan perspektif dapat benar. Meskipun perspektif yang berbeda hanya memiliki kebenaran parsial.

Mannheim kemudian melangkah lebih jauh: ia mengklaim bahwa adalah sesuatu yang mungkin untuk menentukan “ada ide yang dapat dikatakan benar-benar valid dalam situasi tertentu”. Misalnya, seseorang dapat menilai sikap etis atau interpretasi moral dalam pengaturan yang diberikan, dengan mengevaluasi sejauh mana mereka merujuk kepada norma-norma yang orang di masa itu bisa sesuai dan yang akan memungkinkan mereka menemukan tanggapan spiritual baru dan kemungkinan-kemungkinan baru pembangunan manusia. Sebuah teori maka akan salah, atau pengetahuan akan terdistorsi, jika diabaikan realitas baru.<sup>19</sup>

Dari awal karir intelektualnya, Mannheim berusaha untuk memahami “sintesis” yang telah dicapai secara historis dalam ideologi, utopia dan sistem filsafat. Mannheim mengemukakan bahwa sintesis yang penting bagi sejarah kehidupan intelektual karena penyelidikan sejarah menunjukkan bahwa setiap analisis sosiologis menunjukkan

---

<sup>18</sup> Harvey Goldman, *Op.Cit.*, hlm. 267.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

bahwa gaya pemikiran berbaur tanpa terputus dan menembus satu sama lain secara timbal balik dengan sejarah, dimana didalamnya ada proses-proses pembentukan hegemoni. Namun Mannheim tetap percaya bahwa semua pemikiran manusia begitu terstruktur yang harus mengasumsikan mutlak berada di tempat-dan karenanya mengandaikan satu atau bidang lain dari pengalaman sebagai mutlak". Memang, kata dia, ada pola konkret mutlak yang berbeda di setiap zaman. Namun itu adalah mutlak berlangsung dalam proses genetik, dan itu bisa digenggam hanya dari posisi yang pasti dalam proses yang sama.<sup>20</sup>

Bagi Mannheim, pengetahuan manusia tidak dapat dipisahkan dari subjektivitas dan kondisi psikologis individu yang mengetahuinya. Pengetahuan dan keberadaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semua pengetahuan dan kepercayaan adalah produk dari proses sosial-politik. Terkait hal ini, Mannheim menjelaskan dengan teorinya tentang relasionisme. Oleh karena itu, kebenaran pemikiran benar-benar hanya kontekstual, kebenaran dinamis, dan terbuka untuk pelengkap, koreksi, dan perluasan, bukan kebenaran universal.<sup>21</sup>

Namun, mengakui bahwa relasionisme tidak bisa dihasilkan oleh seseorang dalam arti sendirian. Melainkan ia harus bergabung dengan kelompok-kelompok agar memaksimalkan ide dan gagasannya. Dari sinilah kemudian lahirnya kelompok-kelompok intelektual, yang masing-masing dari mereka mengusulkan tema yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>21</sup> Gregory Baum, *Op.Cit.*, hlm. 13.

berbeda-beda akan ide dan gagasannya. Mannheim berharap bahwa ditindaklanjuti dalam hal kapasitas pendidikan untuk melepaskan intelektual dari struktur mereka ke asal kelas mereka, agar mereka dapat menciptakan kehendak bersama di masyarakat dan berusaha menciptakan keseimbangan di masyarakat, yaitu tujuan integrasi sosial berdasarkan komitmen dalam rangka menciptakan sebuah mediasi antara masyarakat dan kekuasaan yang dibentuk oleh zaman. Namun dalam hal ini, Mannheim tidak memberikan argumen untuk menerima standar dan tujuan sebagai sesuatu selain produk dari lingkungan intelektual dan sosial sendiri, atau sebagai sesuatu yang lebih dari pernyataan yang teruji dan dibenarkan atau benar menurut definisi.<sup>22</sup>

Mannheim awalnya mengusulkan teori sosiologi pengetahuannya dengan tujuan menunjukkan bagaimana caranya menciptakan pemikiran ulang tentang pengetahuan dan politik di tengah-tengah krisis. Munculnya sosiologi ini sendiri merupakan produk dari krisis, perubahan, dan kondisi. Sosiologi pengetahuan harus membantu mengidentifikasi “krisis” yang dialami dan melakukan upaya resolusi berdasarkan posisi seseorang/kelompok di masyarakat. Sosiologi pengetahuan, menurut Mannheim, akan memberikan sudut pandang yang berusaha menyadarkan masyarakat untuk setuju atau tidak terhadap suatu sintesis. Sosiologi pengetahuan harus dimulai dengan tujuan dan kebutuhan untuk sintesis yang begitu kuat hadir.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Harvey Goldman, *Op.Cit.*, hlm. 273.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Salah satu cara untuk melampaui beberapa batas sekarang sosiologi pengetahuan dan pada saat yang sama untuk membuat kontribusi baru dalam produksi pengetahuan dalam pengaturan yang berbeda. Sosiologi pengetahuan harus menempatkan refleksi bahwa semua posisi intelektual berusaha untuk menciptakan skema pada realitas sosial yang totaliter dalam beberapa bentuk. Selanjutnya, kita harus mampu menempatkan semua posisi intelektual, termasuk kita sendiri, dalam kerangka penafsiran dan pilihan posisi, perspektif, dan implikasi sedemikian rupa untuk memungkinkan kita mengevaluasi lingkup besar dari kesadaran diri dalam hal sosial dan intelektual. Dengan cara ini, teori sosial dan sosiologis dapat dipahami sebagai bentuk “produksi pengetahuan” bukan hanya sebagai sumber empirik pengetahuan yang diuji, atau praktik-praktik diskursif.<sup>24</sup>

Setidaknya terdapat lima dimensi yang sangat penting untuk diketahui dalam mengetahui bagaimana produksi pengetahuan dapat menjadi sebuah praktek sosial. *Pertama*, dimensi kolektif yang luas. Terdiri dari konstelasi luas bersama pengalaman, representasi, penilaian, dan struktur mental tertanam dalam sejarah. Ini adalah situs konflik, kepentingan divergen, kontrol hegemonik, subkultur, dan perbedaan regional, etnis, dan profesional. *Kedua*, dimensi institusional, formal dan informal, dengan sistem stratifikasi, ruang posisi, dan mode komunikasi. Dimensi ini juga bersifat kolektif, meskipun itu adalah bagian terorganisir dan terfokus kepentingan kolektif dan lagi situs konflik. *Ketiga*, aturan linguistik dan konseptual untuk pembentukan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

pengetahuan. Hal ini bertindak sebagai kerangka kerja, atau bahkan sebagai “tata bahasa generatif,” untuk pengetahuan disiplin, tapi melintasi batas-batas disiplin dan tunduk pada variasi, refraksi, dan retranslation di daerah yang berbeda. *Keempat*, disiplin terorganisir dan pola produksi. Dengan peraturan dan praktik baik sadar dan bawah sadar, dan dengan pengaruh antara disiplin. Pola disiplin ini memberikan masalah, norma, dan model pengetahuan. *Kelima*, penciptaan pikiran individual. Ini selalu beroperasi dalam kerangka dan diatur, meskipun tidak diperhitungkan dan tidak sepenuhnya diinternalisasi oleh struktur, sosial dan sebagainya, dan dengan sistem klasifikasi, semua terhubung secara konkret dan cara yang spesifik dengan posisi sosial dan struktur sosial.<sup>25</sup>

Produksi pengetahuan yang inovatif dibentuk oleh interaksi yang kompleks dari banyak dimensi. Dalam setiap kasus produksi seperti itu, kita harus mencari dan menganalisis bobot dari berbagai faktor dan bentuk interaksi khusus mereka. Proses ini membutuhkan penyelidikan tidak hanya dari teks-teks sebagai objek empiris dan “hipotesis” mereka, tetapi juga kondisi produksi dalam pengaturan yang dipermasalahkan. Jika pengaturan kontemporer, penyelidikan juga akan membutuhkan arsip dan data wawancara dan pemeriksaan dari lembaga pendidikan saat ini, penelitian, dan penyebaran ide. Dengan cara ini, diinformasikan oleh sosiologi

---

<sup>25</sup> Pierre Bourdieu, 1995, *Language and Symbolic Power*, (Cambridge: Polity Press), hlm. 13.

pengetahuan, teori sosiologi dapat menjadi lebih refleksif dengan memperbesar proyek baik dari segi objek dan metode dan sarana penelitian.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> *Ibid.*

## I.7. Metodologi Penelitian

Secara umum metodologi penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai ‘kegiatan ilmiah’ karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. ‘Terencana’ karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Sekaran (2003) mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.<sup>27</sup>

John Creswell (2008) mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan *me-review* bahan bacaan atau kepustakaan. Sesudah itu menentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa data. Kemudian menafsirkan (*interpretation*) data yang diperoleh. Penelitian ini berpuncak pada pelaporan hasil penelitian. Pembaca atau *audience* akan mengevaluasi dan selanjutnya menggunakannya. Dari identifikasi masalah hingga pelaporan, semuanya berlangsung dalam suatu proses bertahap yang berurutan secara teratur dan sistematis.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo), hlm 5.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 6.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalem. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya.<sup>29</sup>

Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap penelitian kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>30</sup> *Ibid.*

### I.7.1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Penelitian ini dibatasi pada hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Contoh-contoh penelitian semacam ini adalah penelitian sejarah, penelitian pemikiran tokoh, penelitian (bedah) buku dan berbagai contoh lain penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan. Dengan kata lain, apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>31</sup> Riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini.

Mestika Zed (2014), mengungkapkan bahwa riset kepustakaan setidaknya memiliki empat ciri utama. *Pertama*, dalam riset kepustakaan, peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda

---

<sup>31</sup> Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Pustaka Obor), hlm 3.

lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi filologi, sedang ilmu sejarah mengenal 'metode kritik sumber' sebagai metode dasarnya. Jadi perpustakaan adalah laboratorium peneliti kepustakaan dan karena itu teknik membaca teks (buku atau artikel dan dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan. *Kedua*, data pustaka bersifat 'siap pakai' (*readymade*). Artinya peneliti tidak pergi ke mana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.<sup>32</sup>

Ciri yang *ketiga*, ialah bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Sumber pustaka sedikit banyak mengandung bias (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya. Dengan begitu, peneliti hampir tidak selalu memiliki kontrol terhadap bagaimana data itu dikumpulkan dan dikelompokkan menurut keperluan semula. Namun demikian, data pustaka, sampai tingkat tertentu, terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber primer, sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu sendiri.<sup>33</sup>

Ciri yang *keempat*, adalah bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik, tetap. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 4.

<sup>33</sup> *Ibid.*

data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film). Karena alasan itu pula, maka peneliti yang menggunakan bahan kepustakaan memerlukan pengetahuan teknis yang memadai tentang sistem informasi dan teknik-teknik penelusuran data pustaka secukupnya.<sup>34</sup>

### **I.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Kepustakaan.

Teknik pengumpulan data kepustakaan yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan data-data primer langsung melalui buku-buku yang langsung ditulis oleh Mohammad Natsir, di antaranya *Capita Selecta Jilid I-III*, *Fiqhud Dakwah*, *Islam sebagai Dasar Negara*, dan *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Sebagai bahan kajian teoritis, penulis mengambil referensi melalui buku-buku sosiologi, baik yang cetak maupun elektronik yang ditulis oleh beberapa sosiolog di antaranya Karl Mannheim, Ibnu Khaldun, Harvey Goldman, dan lain sebagainya. Penulis juga melengkapi dengan sumber-sumber sekunder yang berasal dari arsip, buku, jurnal, tesis/disertasi serta dokumentasi yang membahas seputar pemikiran Mohammad Natsir dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 5.

kiprahnya membangun gerakan sosial dan politik. Adapun sumber-sumber tersebut antara lain seperti tesis oleh Murjoko (2004) yang berjudul *Mosi Integral Natsir 1950*, jurnal Audrey Kahin (2012) yang berjudul *Natsir and Sukarno: Their Clash over Nationalism, Religion, and Democracy*, jurnal Yusril Ihza Mahendra yang berjudul *Combining Activism and Intellectualism: The Biography of Mohammad Natsir (1908-1993)*, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh penulis melalui riset pustaka kemudian dibaca, dicatat dan dianalisis secara mendalam. Data tersebut juga penulis hubungkan dengan teori-teori sosiologi terkait, dituangkan melalui bahasan pada bab dan sub-bab, dan disimpulkan sehingga didapatkan hasil penelitian yang lengkap dan memenuhi syarat sebagai sebuah penelitian sosiologi.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip, foto, teori atau dalil yang berhubungan langsung dengan masalah penyelidikan. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan teknik dokumentasi untuk memperoleh data masa lampau dan data masa sekarang mengenai Mohammad Natsir. Sebab, bahan-bahan dokumentasi ini memiliki arti metodologi yang sangat penting bagi penulis untuk memperoleh orientasi historis mengenai sosok Mohammad Natsir. Sumber dokumentasi yang dilakukan tidak hanya

terbatas pada literatur-literatur ilmiah, tetapi juga merujuk pada sumber lain seperti koran, majalah, foto-foto, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

### 3. Teknik Wawancara

Teknik ketiga yang digunakan oleh penulis adalah teknik wawancara. Hal ini dimaksudkan sebagai penguat dari analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, narasumber wawancara yaitu Hadi Nur Ramadhan, selaku peneliti Pusat Kajian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

#### **I.7.3 Analisis Isi**

Teknik olah data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan analisa deskriptif melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*). Menurut Krippendorff (1991), analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan shahih datanya dengan memerhatikan konteksnya. Sedangkan menurut Weber (2004), analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Jumal Ahmad, 2018, *Desain Penelitian Analisis Isi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm 2.

Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif. Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis. Apabila objek penelitian berhubungan dengan data-data verbal maka perlu disebutkan tempat, tanggal dan alat komunikasi yang bersangkutan. Namun, kalau objek penelitian berhubungan dengan pesan-pesan satu dalam suatu media atau teks, perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantarkan pesan itu.<sup>36</sup>

Bentuk klasifikasi dalam studi analisis isi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis isi berupa wacana (*discourse analysis*). Analisis wacana (*discourse analysis*) adalah suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana (*discourse*) yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual. Analisis wacana dalam penelitian ini cenderung untuk mengambil posisi sebagai metode penggali kerja ideologi dan hubungan kekuasaan dalam teks karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks, memfokuskan pada

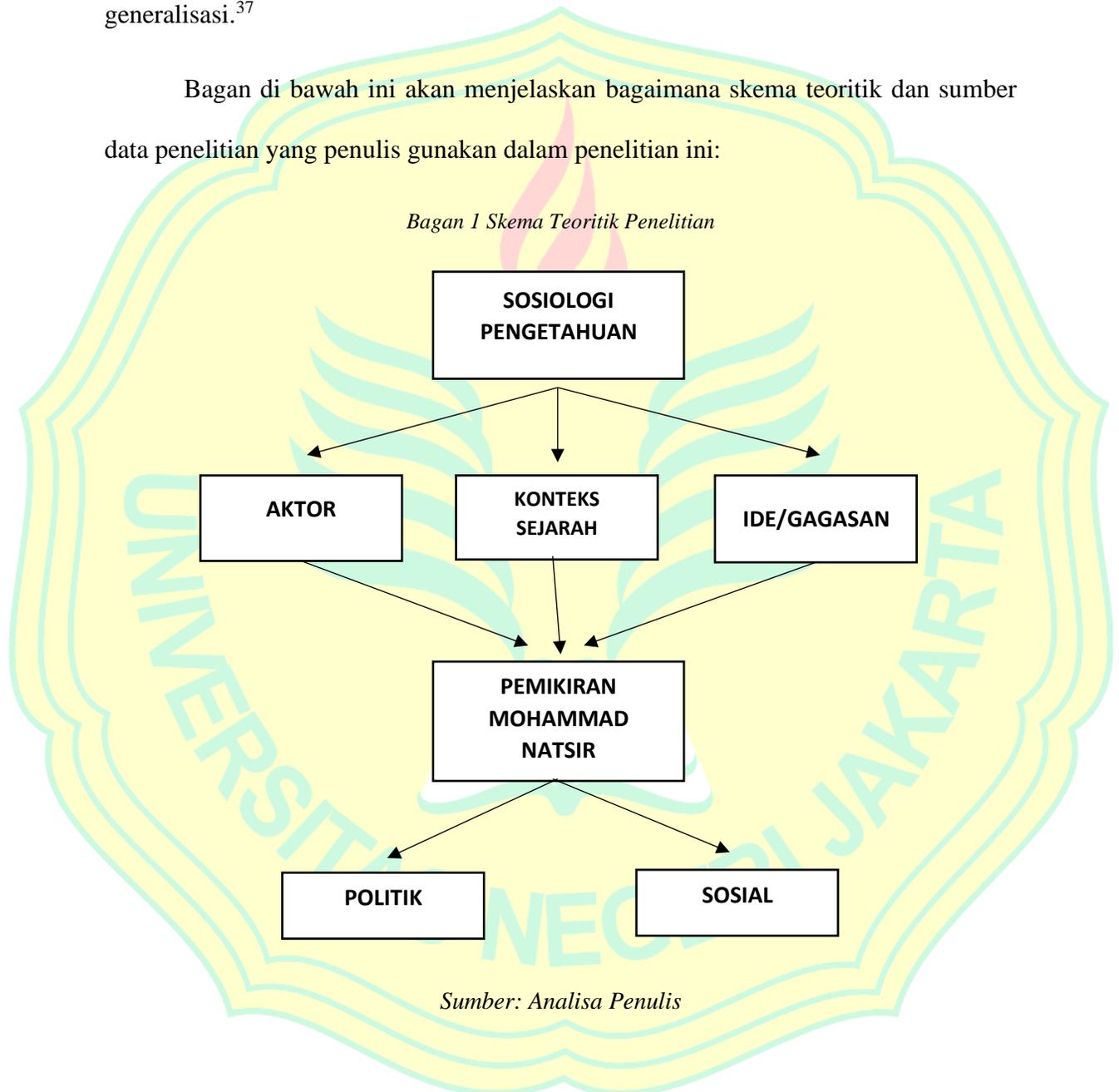
---

<sup>36</sup> *Ibid.*

pesan yang bersifat laten, dan analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi.<sup>37</sup>

Bagan di bawah ini akan menjelaskan bagaimana skema teoritik dan sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

*Bagan 1 Skema Teoritik Penelitian*



*Sumber: Analisa Penulis*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 10-12.

## I.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar cara penulisan menjadi lebih sistematis. Hal ini bertujuan agar memudahkan penulis, maupun pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I;** Pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal umum dan prinsipil dalam penelitian, seperti misalnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian sejenis, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan itu sendiri. **BAB II;** Biografi Mohammad Natsir. Dalam bab ini, peneliti menjabarkan profil biografis dari Mohammad Natsir, konteks sosio-historis Indonesia dalam riwayatnya, serta genealogi pemikiran Mohammad Natsir berdasarkan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya.

**BAB III;** Pemikiran Politik Mohammad Natsir. Bab ini secara khusus akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pemikiran politik Mohammad Natsir, seperti misalnya pandangannya mengenai Islam dan negara, Pancasila, nasionalisme, pemerintahan dan demokrasi, mosi integral Natsir, Islam sebagai dasar negara, dan seputar hubungan antara Natsir dan Soekarno. **BAB IV;** Pemikiran Sosial Mohammad Natsir. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pokok-pokok pemikiran sosial Mohammad Natsir, seperti misalnya tentang pandangannya mengenai masyarakat ideal, ideologi pendidikan, Islam dan akal merdeka, Natsir menjawab kelemahan umat, kiprah Natsir di Dewan Dakwah (DDII), serta pandangan Mohammad Natsir mengenai toleransi.

**BAB V;** Dari Pemikiran Politik ke Pemikiran Sosial. Pada bab ini, akan dijelaskan secara khusus mengenai analisis penulis secara sosiologis terhadap proses transformasi

pemikiran Mohammad Natsir dilihat dari konteks sosialnya dan respon Mohammad Natsir terhadap dinamika sejarah. Pada bab ini, akan ada penjelasan mengenai proses mobilitas vertikal seorang Mohammad Natsir, dinamika perdebatan intelektualnya, distribusi gagasan intelektualnya, transformasi gerakan intelektual Mohamad Natsir, dan relevansi pemikiran Mohammad Natsir terhadap perkembangan sosial dan poilitik Indonesia saat ini. Tak lupa, penulis juga menambahkan kritik terhadap Mohammad Natsir, baik itu kritik secara pemikiran maupun terhadap sosok Mohammad Natsir itu sendiri. **BAB VI**; berisikan penutup dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran terhadap peneltian yang sudah penulis lakukan.

